

**OPTIMALISASI STALTAHMIL PUSPOMAL GUNA MENINGKATKAN STANDAR
OPERASIONAL DAN KEAMANAN
DALAM RANGKA Mendukung TUGAS TNI AL**

Hengky Widodo¹, DR. Amin Lestari., M.M., M.Pd², Udin Solehudin³

Strategi Operasi Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: ¹bhogestblue21@gmail.com, ²amin_lestari@seskoal.ac.id, ³udinsolehudin68@gmail.com

Abstrak

Instalasi Tahanan Militer Puspomal merupakan tempat penahanan bagi Prajurit TNI AL yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Peradilan Militer. Di dalam Staltahmil Puspomal dilaksanakan suatu program-program pembinaan personel yang bertujuan menyiapkan kembali Prajurit TNI Angkatan Laut yang patuh dan taat kepada peraturan sehingga Prajurit tersebut dapat melaksanakan kembali tugasnya di satuan sehingga tugas TNI Angkatan Laut dapat terlaksana dengan baik. Dalam membentuk kembali Prajurit TNI AL yang taat pada aturan diperlukan sumber daya manusia Prajurit Pomal yang berkualitas, legalitas SOP pengurusan Staltahmil Puspomal dan peningkatan sarpras yang dimiliki oleh Staltahmil Puspomal saat ini. Beberapa hal diuraikan di atas menjadi latar belakang penulis untuk menyusun Taskap tentang optimalisasi staltahmil puspomal guna meningkatkan standar operasional dan keamanan dalam rangka mendukung tugas TNI AL dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Yang menjadi obyek penulisan adalah Staltahmil Puspomal dengan berdasarkan kepada pengalaman penugasan penulis selama berdinis di Puspomal didukung dengan hasil pengamatan di lapangan dikuatkan dengan data-data pendukung yang bersifat administrasi maupun literatur maka didapat bahwa optimalisasi Staltahmil Puspomal perlu dilakukan agar fungsi pengurusan tahanan militer meningkat sehingga Puspomal dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Kata Kunci : Fungsi pengurusan tahanan militer di Staltahmil Puspomal

ABSTRACT

The military detention installation The Naval Military Police Center is a place of detention for Indonesian Navy Soldiers who are currently undergoing the process of investigation, prosecution and trials in Military Courts. Within the military detention installation, the Naval Military Police Center implemented a personnel development program aimed at re-preparing Indonesian Navy Soldiers who obey and comply with regulations so that these Soldiers can carry out their duties again in units so that the Navy's duties can be carried out properly. In reforming Indonesian Navy Soldiers who obey the rules, quality human resources for Navy Military Police Soldiers are needed, the legality of the Standard Operational Procedures for managing the military detention installations of the Naval Military Police Center and improvement of facilities and infrastructure owned by the military detention installations of the Military Police Forces Center Current sea. Some of the things described above are the author's background for compiling a Tasks on optimizing the military prison installation of the Navy Military Police Center in order to improve operational and security standards in order to support the duties of the Indonesian Navy by using a descriptive method of analysis. The object of writing is the military prison installation of the Naval Military Police Center. Based on the experience of the author's assignment while serving at Puspomal, it is supported by the results of observations in the field corroborated by administrative and literary supporting data, it is found that the optimization of the Military Police Central military prison installation The Navy needs to be carried out so that the function of managing military prisoners increases so that the Naval Military Police Center can support the implementation of the duties of the Indonesian Navy

Keywords: The function of managing military prisoners in the military detention center for the Naval Military Police Center

1. PENDAHULUAN

TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dalam melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut diperlukan seorang Prajurit yang taat dan patuh pada aturan hukum. Penegakan hukum, disiplin dan kode etik prajurit menempati posisi sangat penting, konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI sangat berpengaruh terhadap terlaksananya tugas TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, penyimpangan perilaku dan sikap kurang terpuji merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi kendala bagi upaya membangun TNI AL yang profesional, solid, militan dan dicintai rakyat. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI AL harus diproses secara hukum oleh Polisi Militer bagi pelaku pelanggaran harus diberikan hukuman salah satunya berupa penahanan.

Staltahmil Puspomal merupakan tempat penahanan bagi Prajurit TNI AL yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Peradilan Militer. Di dalam Staltahmil Puspomal

dilaksanakan suatu program-program pembinaan personel yang bertujuan menyiapkan kembali Prajurit TNI Angkatan Laut yang patuh dan taat kepada peraturan sehingga Prajurit tersebut dapat melaksanakan kembali tugasnya di satuan sehingga tugas TNI Angkatan Laut dapat terlaksana dengan baik. Saat ini prosedur pengurusan tahanan militer sendiri masih belum dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya standar operasional dan prosedur yang dilegalisasi oleh Satuan dan saat ini hanya berpedoman pada SOP yang dibuat secara internal oleh Staltahmil Puspomal. Prajurit puspomal yang mengawaki Staltahmil Puspomal belum memiliki kompetensi sebagai penjaga Tahanan dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada pendidikan yang secara khusus membentuk Prajurit pomal di bidang rustahmil. Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih kurang jika dihadapkan dengan proses pengurusan tahanan militer terkait dengan keamanan dan pembinaan perseoneel seperti fasilitas olah raga, fasilitas keamanan dan lain sebagainya. Kondisi yang diharapkan adalah Staltahmil memiliki SOP yang baku sesuai dengan petunjuk Administrasi Rustahmil, Staltahmil Puspomal memiliki pengawak-pengawak organisasi yang berkualitas dan jumlah yang ideal untuk pengamanan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar keamanan instalasi tahanan militer.

Dalam mengembangkan kemampuan Puspomal dalam melaksanakan fungsi pengurusan tahanan militer maka diperlukan suatu petunjuk penyelenggaraan pengurusan tahanan militer di lingkungan TNI Angkatan Laut yang menguraikan secara rinci tentang tata cara dan kegiatan pengurusan Tahanan Militer di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berbagai kendala yang dihadapi harus segera dicari solusi untuk mengoptimalkan organisasi Staltahmil yang saat ini sudah ada. Untuk mewujudkan keberhasilan tugas Puspomal di bidang pengurusan tahanan militer diperlukan kebijakan yang tepat akan menjadikan sebagai petunjuk kepada satuan bawah dalam berbuat dan bertindak. Strategi yang terdiri dari tujuan, cara dan metode merupakan solusi terbaik untuk keluar dari permasalahan yang dialami oleh Staltahmil Puspomal dalam melaksanakan fungsinya. Upaya merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing pemegang kendali, melalui tindakan atau perbuatan nyata untuk mengoptimalkan Staltahmil Puspomal. Dalam penentuan Kebijakan, strategi dan upaya penulis menggunakan suatu analisa pembahasan kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, literature atau studi kepustakaan serta didukung dengan masa penugasan penulis selama di Pomal, hal tersebut merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan organisasi Puspomal dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

2. Metode dan Pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif deduktif berdasarkan pada pendekatan kepustakaan dan pengalaman penugasan penulis.

3 Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Prajurit Staltahmil Puspomal penulis menggunakan teori Marwansah yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial, berdasarkan teori tersebut bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Prajurit Staltahmil Puspomal perlu dilakukan langkah-langkah pada bidang Pendidikan dimana pendidikan merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk membentuk dan mengembangkan kualitas calon prajurit dan prajurit, yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, kecerdasan, keterampilan dan kesamaptaan jasmani, agar mampu mengemban tugas sebagai kekuatan pertahanan negara.

a. Pendidikan Prajurit Pomal.

sebagai bagian integral dari pembinaan Personel TNI AL mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mengembangkan

kualitas prajurit Pomal sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Pendidikan profesi merupakan ilmu yang lebih spesifik dalam menjadikan seorang Prajurit lebih profesional lagi namun pengembangan profesi harus sejalan dengan pendidikan nasional. Untuk meningkatkan kualitas Prajurit Pomal dalam bidang pengurusan tahanan militer pada lembaga pendidikan Pusdikpomal perlu dibuat program pendidikan yang secara khusus mengajarkan mengenai pengurusan tahanan militer pada strata Perwira, Bintara dan Tamtama. Program pendidikan pengurusan tahanan militer dapat digunakan sebagai pedoman oleh seluruh Prajurit Pomal sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengurusan Tahanan Militer.

Untuk mewujudkan adanya aturan yang mengatur secara detail tentang tata cara dan kegiatan pengurusan Tahanan Militer maka perlu disusun suatu Petunjuk Teknis Tata Cara Pengurusan Tahanan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang berisikan tentang tata cara dan kegiatan pengurusan Tahanan Militer yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Polisi Militer dan sebagai bahan ajaran pada lembaga pendidikan Pusdikpomal. Dengan adanya pengembangan program pendidikan pengurusan tahanan militer di Pusdikpomal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

Prajurit Pomal dan Puspomal khususnya sehingga dapat menciptakan Prajurit Pomal yang berkualitas dan siap mengisi/mengawaki organisasi Staltahmil Puspomal sehingga Puspomal menjadi lebih Profesional.

Pendidikan pengembangan spesialis pengurusan tahanan militer yang diselenggarakan oleh Pusdikpomal diharapkan setiap Prajurit Pomal dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

Kuantitas Prajurit Staltahmil Puspomal sangatlah kurang apabila dihadapkan dengan tantangan tugas dan validasi organisasi Puspomal itu sendiri, dalam menghadapi permasalahan yang ada perlu dilakukan langkah strategis yaitu berupa meningkatkan jumlah Personel Staltahmil dengan memanfaatkan Personel Puspomal yang ada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan personel Pomal diawali dengan melalui penyediaan. Penyediaan Prajurit yang merupakan kegiatan untuk mengisi organisasi TNI khususnya Puspomal, mempunyai peranan menentukan untuk mendapatkan Prajurit Pomal baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk memperoleh Prajurit Pomal yang berkuantitas serta mampu memenuhi tuntutan tugas, maka penyediaan Prajurit Pomal dilaksanakan melalui penerimaan dan pengerahan dengan kegiatan-kegiatan pengujian atau penyaringan

berdasarkan persyaratan serta kriteria yang ditentukan. Di samping itu, dilaksanakan pula pengangkatan kembali mantan Prajurit yang dulunya bertugas di Puspomal sebagai salah satu upaya untuk mendukung kegiatan penyediaan dalam mengisi kebutuhan organisasi. Kebijakan dasar dalam melaksanakan kegiatan penyediaan ditentukan sebagai berikut:

- a Penyediaan Prajurit Pomal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengawakan organisasi.
- b Penyediaan Prajurit Pomal dilaksanakan dengan lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas.
- c Komposisi penyediaan Prajurit Pomal disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan tugas.
- d Penyediaan Prajurit Pomal dilaksanakan melalui proses seleksi dengan memperhatikan faktor Satuan awal.
- e. Peningkatan kuantitas Prajurit Pomal.

sebagai pengawak organisasi Staltahmil Puspomal ini sangat perlu, namun pemenuhan kebutuhan Personel tidak mengabaikan proses rekrutmen Prajurit Pomal yang sesuai dengan aturan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil didik pada akhirnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan personel yang ideal dapat dilakukan BKO dari Satuan lain sesuai dengan kebutuhan pengawak organisasi Staltahmil Puspomal. Dalam

memperoleh pengawak organisasi yang *The Right Man On The Right Place* memerlukan suatu manajemen yang berbasis uji kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan ditempatinya. Dalam pembinaan karier secara kompetitif dan pengawakan organisasi secara profesional perlu melaksanakan Standar Kompetensi Prajurit Pomal. Dari sinilah terlihat hubungan antara kualitas dan kuantitas dimana kualitas sangat mendukung jumlah DSP yang terisi.

Selama ini uji kompetensi belum dilaksanakan secara maksimal untuk memenuhi standar pengisian jabatan pada organisasi Staltahmil. Keterbatasan organisasi yang ada di Satltahmilpun juga berpengaruh pada kuantitas Staltahmil Puspomal. Untuk mengatsai permasalahan tersebut prioritas penempatan personel diutamakan pada pengawakan Satker terpilih. Riil DSP Puspomal diupayakan akan tetap dipertahankan kuantitasnya selaras dengan terjadinya penyusutan personel melalui susut alamiah/pensiun atau non alamiah serta mutasi dengan melakukan penambahan melalui BKO dari satuan lain yang disesuaikan dengan kompetensi pengurusan tahanan militer sehingga tercapai kondisi kuantitass yang ideal.

Jumlah pengawak organisasi Staltahmil Puspomal yang ideal bagi Puspomal adalah sesuai dengan pentahapan pada fungsi pengurusan tahanan militer mulai dari proses

penerimaan, penempatan, pengamanan dan pengawalan, perawatan atau rehabilitasi, pengeluaran dan pembebasan. Untuk mawadahi tahap yang dilaksanakan oleh Staltahmil dapat dilakukan dengan melakukan validasi organisasi Staltahmil Puspomal. Pada penambahan organisasi di Staltahmil Puspomal diperlukan tenaga pengamanan yang banyak karena terkait dengan menjaga tahanan yang memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Idealnya DSP Staltahmil adalah :

Tabel 6.1. DSP Staltahmil Puspomal yang Ideal

NO	STRATA	JUMLAH
1	Pamen	4
2	Pama	4
3	Bintara	15
4	Tamtama	11
5	PNS	2
	Jumlah	36

Sumber : Diolah oleh Penulis tahun 2023

Idealnya untuk jumlah Pengawak Organisasi sesuai dengan jabatan yang menyelenggarakan fungsi pengurusan tahanan militer adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2. Jumlah DSP Staltahmil Puspomal yang Ideal

NO	JABATAN	PANG KAT	KORP S/ KEJU RUAN
1	2	3	4
1	Kastaltahmil	Letkol	PM
2	Kataud	Lettu	PM

3	Ur Agenda Arsip	PNS IId	-
4	Ur Operator	PNS IId	-
5	Kasi Pamwaltah	Mayor	PM
6	Kasubsi Pamtah	Kapten	PM
7	Ur Pamfik 1	Peltu	Pom
8	Ur Pamfik 2	Serka	Pom
9	Ur Pamfik 3	Kopka	Pom
10	Ur Pamfik 4	Kls	Pom
11	Ur Pampers 1	Peltu	Pom
12	Ur Pampers 2	Serka	Pom
13	Ur Pampers 3	Kopka	Pom
14	Ur Pampers 4	Kls	Pom
15	Ur Pamdok 1	Peltu	Pom
16	Ur Pamdok 2	Serka	Pom
17	Ur Pamdok 3	Kopka	Pom
18	Ur Pamdok 4	Kls	Pom
19	Ur Pammatinstal 1	Serka	Pom
20	Ur Pammatinstal 2	Kopka	Pom
21	Ur Pammatinstal 3	Kopda	Pom
22	Ur Pammatinstal 4	Kls	Pom
23	Kasubsi Waltah	Kapten	PM
24	Ur Wal 1	Serma	Pom
25	Ur Wal 2	Sertu	Pom
26	Ur Wal 3	Koptu	Pom
27	Ur Wal 4	Kls	Pom
28	Kasi Rehabtah	Mayor	PM
29	Kasubsi Rehab	Kapten	PM
30	Ur Rehab 1	Peltu	Pom
31	Ur Rehab 2	Serka	Pom
32	Kasubsi Jasrek/Roh	Kapten	PM
33	Ur Jas 1	Serma	Pom
34	Ur Jas 2	Sertu	Pom
35	Ur Roh 1	Peltu	Pom
36	Ur Roh 2	Serka	Pom

Sumber : Diolah oleh Penulis Tahun 2023

c. Standar Operasional Dan Prosedur Pengurusan Tahanan Militer Di Staltahmil Puspomal.

Di dalam pengurusan tahanan militer yang ada di Staltahmil Puspomal idealnya memiliki standar operasional dan prosedur yang tertuang dalam suatu regulasi yang disusun oleh Puspomal, meliputi segala kegiatan yang terbagi dalam empat tahap yaitu tahap penerimaan tahanan, penempatan tahanan, pengamanan tahanan, pengawalan tahanan, perawatan tahanan, pengeluaran tahanan dan pembebasan tahanan. Dalam suatu kegiatan pengurusan tahanan harus melalui proses awal diterimanya tahanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, adapun konsep optimalisasi SOP Staltahmil Puspomal dapat dilakukan dengan menyusun konsep sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Tahanan Militer.
- 2) Penempatan Tahanan Militer.
- 3) Pengamanan Tahanan Militer.
- 4) Pengawalan Tahanan Militer.
- 5) Perawatan Tahanan Militer.
- 6) Pengeluaran Tahanan Militer.
- 7) Pembebasan Tahanan Militer.

3. KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan

a. Peningkatan sumber daya manusia Prajurit Puspomal dapat ditingkatkan dengan memberikan pendidikan pengurusan tahanan militer baik pada saat pendidikan pertama maupun pengembangan, membuat konsep program pendidikan pengurusan tahanan militer di lembaga pendidikan TNI AL dengan jumlah seat yang lebih banyak atau mengikutkan Prajurit Pomal pada lembaga pendidikan di luar TNI AL seperti Pusdikpom Cimahi atau Diklat Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Selain itu dapat juga mengikutkan Prajurit Pomal pada pelatihan-pelatihan atau kursus yang berorientasi pada pengurusan tahanan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kuantitas Prajurit Pomal yang berdinasi di Staltahmil Puspomal dapat dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah personel Staltahmil Puspomal melalui mutasi (Tour of duty) atau mem BKO kan Personel dari satuan Pomal wilayah, cara lain dapat dilakukan dengan menambah jabatan pada organisasi Staltahmil Puspomal melalui validasi organisasi.

Peningkatan standar operasional dan keamanan Staltahmil Puspomal dapat dilakukan dengan melakukan pembentukan Pokja yang membuat aturan tentang petunjuk administrasi maupun petunjuk teknis tentang pengurusan tahanan militer kemudian

hasil dari kerja Tim Pokja dibuat regulasi oleh Mabesal dalam bentuk Perkasal. Dengan adanya regulasi tersebut maka buku petunjuk pengelolaan tahanan militer dapat dijadikan sebagai standar operasional dan prosedur (SOP) atau pedoman bertindak bagi setiap Prajurit Pomal pengawas organisasi Staltahmil Puspomal.

Peningkatan Sarana dan prasarana Staltahmil Puspomal dapat dilakukan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana melalui proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AL. Rencana kebutuhan disusun dari satuan bawah dalam hal ini Staltahmil Puspomal yang diatur mulai dari tahap penerimaan tahanan, penempatan tahanan, pengamanan dan pengawasan tahanan, perawatan tahanan, pengeluaran dan pembebasan tahanan. Pada tiap tahap tersebut apa sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan kemudian dicatat dan diusulkan kepada Staf umum untuk diusulkan kepada Mabesal melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Saran

a. Perlunya Puspomal mengusulkan pembentukan program pendidikan pengelolaan tahanan militer di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh Pusdikpomal dengan jumlah seat peserta didik lebih banyak kepada Disdikal, atau

mengikut sertakan Prajurit Pomal pada pendidikan, pelatihan-pelatihan maupun kursus yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan Ditjen Pemasyarakatan. Selain itu perlunya Puspomal juga melakukan pengusulan kepada Spersal untuk penambahan jumlah personel di Puspomal atau mengajukan validasi internal pada organisasi Staltahmil Puspomal dengan melakukan penambahan jabatan sehingga secara kuantitas pengawas organisasi Staltahmil Puspomal terpenuhi.

b. Perlunya Puspomal mengajukan usulan pembentukan Tim Pokja kepada Srenaal maupun Spersal untuk membuat buku petunjuk administrasi maupun petunjuk teknis pengelolaan tahanan militer di lingkungan TNI AL yang kemudian buku petunjuk tersebut dibuat regulasi dalam bentuk Perkasal selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Prajurit Staltahmil Puspomal dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan tahanan militer.

c. Perlunya Puspomal mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana Staltahmil Puspomal melalui proses pengadaan barang dan jasa kepada Mabesal, rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan pengtahuan yang ada pada fungsi pengelolaan tahanan militer mulai dari tahap penerimaan, penempatan, pengamanan, pengawasan, perawatan, pengeluaran dan pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Desamarasolhan. Taskap dengan judul “Konsepsi Pembentukan Organisasi Instalasi Tahanan Militer Puspomal Guna Pengurusan Tahanan Militer Dalam Rangka Mendukung Tugas Tni Angkatan Laut”. 2017
- Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam. Malang UIN-Maliki Press. 2010
- Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Alfabeta, 2010
- Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Soetijipto Rafilis, Koreksi Profesi Keguruan (Jakarta: Rhineka Cipto, 2000.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung Mandar Maju, 1994.
- Joko Setiyono, Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Pola Pembinaan Bidang Personel (PUM 1.02), TNI AL
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pusat Polisi Militer TNI Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1017/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengurusan Tahanan Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 2017.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 tentang Organisasi Dan Tugas Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut.
- <https://puspomad.mil.id/instalasi-tahanan-militer/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023. Pukul 15.00 WIB
- <file:///C:/Users/satid/Downloads/UU%20Nomor%203%20Tahun%202002.pd>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2023. Pukul 12.00 WIB
- <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia/>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2023. Pukul 12.05 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-25-Tahun-2014.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023. Pukul 15.00 WIB.